

IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DAN KOTA SEOUL TAHUN 2018 - 2020

Oleh : **Ria Hani Saputri**

email: ria.hani3841@student.unri.ac.id

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP.,MA

Bibliografi : 17 Buku, 5 Jurnal, 4 Laporan, 8 Website,
3 Dokumen, 1 Peraturan Perundang-undangan

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana dua aktor negara bangsa, dalam hal ini Kota Bandung dan Kota Seoul melakukan kerjasama dalam berbagai hal guna meningkatkan kapasitas daerah masing-masing di multibidang. *Sister City* atau kota saudara/kembar merupakan kerjasama yang telah dibangun oleh kedua aktor.

Penelitian dibuat berdasarkan pada teori paradiplomasi, dalam level analisa negara bangsa untuk memahami pelaksanaan suatu kerjasama yang disepakati oleh aktor yang bekerjasama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan data yang bersumber dari *website* resmi Bidang Kerjasama Daerah dengan Luar Negri Kota Bandung, Korea-Seoul Metropolitan City site, buku, dan jurnal yang membahas isu terkait kerjasama *sister city* khususnya *sister city* oleh kedua aktor yakni Bandung dan Seoul.

Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa sebanding dengan hipotesis yang disusun dimana Implementasi terhadap kerjasama *sister city* yang dilakukan berjalan dengan baik. Hal ini ditinjau dari terlaksana dengan baiknya pelaksanaan Program Pemagangan Pegawai *Seoul Metropolitan Government* di Pemerintah Kota Bandung, Fasilitasi Pembukaan *Little Bandung Wall* di Kota Seoul, dan Revitalisasi Sungai Cikapundung.

Kata Kunci: Kota Bandung, Seoul, Paradiplomasi, *Sister City*.

IMPLEMENTASI KERJASAMA SISTER CITY KOTA BANDUNG DAN KOTA SEOUL TAHUN 2018 - 2020

Oleh : Ria Hani Saputri

email: ria.hani3841@student.unri.ac.id

Pembimbing : Faisyal Rani, S.IP.,MA

Bibliografi : 17 Buku, 5 Jurnal, 4 Laporan, 8 Website,

3 Dokumen, 1 Peraturan Perundang-undangan

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

ABSTRACT

The research was conducted to understand how the two actors of the nation state, in this case the City of Bandung and the City of Seoul, cooperate in various ways to increase the capacity of their respective regions in multi-sectors. Sister City or sister/twin city is a collaboration that has been built by the two actors.

The research was made based on the theory of paradiplomacy, in the level of analysis of the nation state to understand the implementation of a cooperation that was agreed upon by the collaborating actors. Data collection was carried out using qualitative research methods, with data sourced from the official website for the Regional Cooperation with Overseas Bandung City, the Korea-Seoul Metropolitan City site, books, and journals that discussed issues related to sister city cooperation, especially sister cities by the two actors, namely Bandung and Seoul.

The results of this paper show that it is comparable to the hypothesis that was developed where the implementation of the sister city cooperation is going well. This is seen from the good implementation of the Seoul Metropolitan Government Employee Apprenticeship Program in the Bandung City Government, Facilitating the Opening of Little Bandung Wall in Seoul City, and Revitalizing the Cikapundung River.

Keywords: Bandung City, Seoul, Paradiplomacy, Sister City.

PENDAHULUAN

Hubungan kerjasama Indonesia-Korea Selatan mengalami perkembangan babak baru yang sangat strategis setelah ditandatanganinya "*Joint Declaration on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation between Republic of Indonesia and the Republic of Korea*" oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Roh Moo Hyun ketika kunjungannya ke Indonesia pada tanggal 4 Desember 2006.

Aktor sub-nasional Indonesia yang berperan dalam pembentukan *Twinning City* atau yang disebut *Sister City* (Kota Kembar) salah satunya adalah Kota Bandung. Bandung merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat. Pada Jumat, 7 Oktober 2016, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Wali Kota Seoul Park Won Soon menandatangani nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/ MOU*) kerja sama di City Hall, Seoul. Kejadian bersejarah itu turut disaksikan oleh Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, John Prasetio. Kerjasama terjalin antara kota yang bersifat luas, disepakati secara resmi dan bersifat jangka panjang.

Setelahnya, KBRI Seoul merilis berita bahwa kerjasama kota kembar (*sister city*) atau yang disebut dalam kesepakatan bersama sebagai kerjasama antar Pemerintah Kota Bandung dan Seoul telah diresmikan, kedua Walikota menyepakati untuk melakukan kerjasama dan pertukaran informasi yang berfokus pada pengembangan *Smart City* dalam beberapa bidang, yaitu Ekonomi Perkotaan, Perencanaan Tata Kota, Mode Transportasi

Perkotaan, dan *E-government*.¹

Tatanan pemerintahan yang berada dibawah Negara seperti Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, saat ini telah dapat ikut andil dalam kancan Hubungan Internasional melalui kerja sama kota kembar (*Sister City*). Perkembangan tersebut terjadi karena kebutuhan untuk mencapai kepentingan nasional secara khusus yang tidak dapat dipenuhi secara mandiri. Kemunculan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional menjadikan format diplomasi berkembang menjadi "*the foreign policy and non-central government*" yang juga disebut sebagai paradiplomasi.

Kehadiran paradiplomasi memberikan kesempatan kepada aktor selain pemerintah pusat seperti kelompok, organisasi, individu, maupun pemerintah daerah untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Pemerintah daerah muncul sebagai aktor baru dalam hubungan internasional dan semakin membuka gerbang bagi dunia luar kepada *Local Government to Local Government*, bahkan *Person to Person* untuk berinteraksi dan berdiplomasi secara langsung. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah dapat semakin gencar dalam melakukan pembangunan keberlanjutan.

Pada kerjasama ini, Korea Selatan memegang peran sebagai sumber modal atau investasi, serta teknologi bagi Indonesia. Sedangkan bagi Korea Selatan, Indonesia memiliki potensi pasar yang cukup menjanjikan dan sumber alam atau mineral yang melimpah, serta tenaga kerja yang

¹Bandung dan Seoul Tandatangan Kerjasama. Kedutaan Republik Indonesia di Seoul, diakses melalui <https://kemlu.go.id/seoul/id> 28 September 2021.

mumpuni seiring berkembangnya perekonomian dalam satu dekade terakhir. Menurut Menko Perekonomian, Korea adalah salah satu mitra strategis khusus, investor terbesar ke-6, dan partner bisnis tradisional Indonesia.²

Sampai saat ini, Bandung telah melakukan kerjasama *Sister City* dengan berbagai kota lain dari segala penjuru dunia.³ Tercatat, Bandung telah bekerjasama dengan 25 mitra kota, baik diluar maupun dalam negeri. Jika ditinjau dari segi karakteristik, Bandung dan Seoul memiliki banyak persamaan. Seoul merupakan salah satu kota metropolitan terpadat didunia. Seoul menjadi destinasi wisata masyarakat dunia saat ini. Selain karena daya tarik Seoul yang menjadi pusat agensi idola *K-POP*, Seoul juga menawarkan tujuan wisata alam yang beragam, serta kemudahan transportasi umum yang ada di Kota Seoul.

Seoul turut menjadi penggerak *fashion* dunia, hal ini seiring dengan berkembangnya *Hallyu Wave* secara universal. Seoul juga dikenal sebagai kota yang berbasis *Smart City* dan pengelolaan tata kelola ruang sangat baik. Seoul adalah satu-satunya Kota Khusus (Istimewa) di Korea Selatan, hal ini dikarenakan sejarahnya yang panjang dan telah menjadi Ibukota Korea Selatan sejak 600 tahun lalu.

²Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menko Airlangga Dampingi Presiden RI ke Korsel, Sejumlah Kerja Sama Ekonomi Disepakati, diakses melalui <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5/menko-airlangga-dampingi-presiden-ri-ke-korsel-sejumlah-kerja-sama-ekonomi-disepakati> pada 26 Oktober 2021.

³Bagian Kerjasama Kota Bandung, *Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri (KSDPL)* diakses melalui <http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl> pada 28 September 2021.

Oleh karena itu, Seoul menjadi titik sentral atau pusat dalam sektor ekonomi, politik, sosial, teknologi, *design* dan budaya di Korea Selatan. Sedangkan Bandung bukan merupakan Ibukota Negara Indonesia dan bukan sebagai kota sentral kegiatan perekonomian dan perpolitikan Negara.

Kerja sama antara Kota Bandung dan Seoul tetap berlanjut walaupun memiliki perbedaan karakteristik diantara keduanya. Namun, Bandung dan Seoul memiliki persamaan status administrasi setingkat Kota sesuai dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 03 Tahun 2008 mengenai syarat-syarat kerja sama *Sister City* (Permendagri No 3, 2008).

Kerjasama Kota Bandung dan Seoul dimulai sejak penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) yang dilakukan pada Mei 2015. Kemudian kerjasama ditindaklanjuti dengan datangnya para pengusaha dari Korea yang dijemputani oleh ASEAN-Korea Center yang menawarkan kerjasama yang berhubungan dengan *smart city* dan perbaikan infrastruktur. Selain melalui ASEAN-Korea Centre, Kota Bandung juga berupaya melibatkan pihak swasta melalui kunjungan langsung dan melalui *Korea International Cooperation Agency* (KOICA).

Pemerintah Kota Bandung melihat Kota Metropolitan Seoul sebagai kota yang berhasil dalam proses penataan kota yang baik dan restorasi kawasan kumuh menjadi kawasan terbuka hijau. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat sebuah rumusan masalah **“Bagaimana Implementasi Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dengan Kota Seoul pada tahun 2018 – 2020?”**

KERANGKA TEORI

Perspektif : Pluralisme

Penelitian dengan tema Kerjasama *Sister city* Kota Bandung dan Kota Seoul dalam jangka waktu tahun 2018 hingga 2020, penulis memilih menggunakan perspektif pluralisme. Pluralis berpendapat bahwa sistem internasional tidak hanya ditentukan oleh aktor Negara, tetapi ada aktor-aktor lain non negara. Pluralis memandang isu hubungan internasional dalam konteks yang lebih luas dan cenderung memfokuskan pada isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat.⁴

Pembahasan *pluralism* meluas ke kasus sosial, ekonomi, dan masalah lingkungan, tidak hanya membahas tentang kemanan nasional dan internasional saja. Didalam perspektif ini semua aktor yang ada didalam hubungan internasional memiliki peran yang sama dan penting dalam suatu sistem internasional.⁵

Teori : Paradiplomasi

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah '*Paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan pada tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomacy*' menjadi '*Paradiplomacy*'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal

tersebut mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*'.

Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy*'.⁶ Konsep paradiplomasi yang dikemukakan oleh Panavotis Soldatos dan dikembangkan Ivo Duchacek, kemudian menjadi pendekatan yang sering digunakan untuk menjelaskan masalah-masalah hubungan internasional oleh aktor sub-nasional.

Duchacek menjelaskan paradiplomasi dalam tiga tipe:⁷

- a. Tipe pertama adalah *transborder paradiplomacy*

Menunjuk pada hubungan institusional, formal maupun informal oleh pemerintah-pemerintah sub nasional yang berbeda negara namun berbatasan langsung secara geografis. Ini sangat dimungkinkan oleh adanya hubungan emosional budaya dan sejarah.

- b. Tipe yang kedua adalah *transregional paradiplomacy*, yaitu hubungan diplomasi yang dilakukan pemerintah sub nasional yang berbeda negara dan tidak berbatasan langsung, namun Negara di mana kedua pemerintahan sub nasional tersebut berada berbatasan langsung dalam satu kawasan.

⁴Muh. Fathun Laode, (2017), review buku "*Human Rights in International Relations*", Hal. 169

⁵Laode Muh. Fathun, "Human Rights in International Relations", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 1 Januari - Juni 2017, h. 168-169

⁶Criekemans, David, 2008 "*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*", hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium

⁷Ivo Duchacek. 1990. Dikutip oleh Stivani Sinambela. "*Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional 'Studi Kasus: Kerjasama Sister City Kota Medan dan Kota Penang'*" (Thesis UMY. Yogyakarta. 2014) hal. 18.

- c. Tipe yang ketiga adalah *global paradiplomacy*, yaitu pemerintah sub nasional yang melakukan hubungan diplomasi berada dalam negara yang berbeda, dari kawasan yang berbeda, dari berbagai belahan dunia.

Jika ditinjau menurut bentuk paradiplomasi yang digunakan, relasi Bandung dan Seoul dapat diklasifikasikan sebagai *Global Paradiplomacy* karena kedua Negara tersebut, Indonesia dan Korea Selatan berada di subregional yang berbeda walaupun masih dalam kawasan benua Asia.

METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dimana penulis mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena serta permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang akan dianalisis oleh penulis.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah melalui data sekunder. Data dapat didapatkan melalui *internet based methods* dan *library research*. Data mengenai hal yang berkaitan dengan Kerjasama *Sister City* Bandung dan Seoul diakses baik itu berbentuk buku, jurnal, berita dan artikel serta laporan-laporan resmi dari Bagian Kerjasama Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kerjasama *Sister City* Kota Bandung dan Kota Seoul

Kerjasama *Sister City* antara Bandung dan Seoul bermula dari adanya peninjauan antar Kota Bandung dan Seoul, mengenai persamaan dan saling pertukaran informasi mengenai potensi yang dapat dikerjasamakan melalui KBRI di Seoul. Setelah adanya kesepakatan antara Bandung dan Seoul, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pernyataan kehendak *Letter of Intent* (LoI) yang tertuang pada “*Letter Of Intent Bertween Bandung Municipality, West Java Province Of The Republic Of Indonesia And Seoul Metropolitan Government, The Republic Of Korea Concerning The Establishment Of City Cooperation*” yang ditandatangani oleh Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Walikota Seoul Park Won Soon bertempat di Seoul, Korea Selatan pada hari Rabu 20 Mei 2015.

Dalam *Letter of Intent* tersebut, rencananya kedua belah pihak akan melakukan mitra kerjasama yang difokuskan dalam enam bidang, yaitu : ekonomi perkotaan, perencanaan perkotaan, transportasi perkotaan, *E-Government*, kebudayaan dan pengembangan kapasitas. Salah satu aspek yang mendasari adanya kerjasama Bandung dan Seoul adalah program Walikota Bandung yang juga berprofesi sebagai Arsitek mencoba untuk menciptakan kota yang nyaman, layak huni dan menyenangkan bagi 2,4 juta penduduknya. Untuk mewujudkan misi tersebut, salah satu strateginya adalah

mengembangkan prinsip *Smart City* dan komunitas.

Dari penandatanganan LoI tersebut, kerjasama dalam bidang ekonomi perkotaan akan fokus pada pembangunan berbasis teknopolis, dalam perencanaan tata kota akan lebih berfokus pada restorasi kawasan kumuh dan perbaikan kawasan tepi sungai, sedangkan untuk transportasi perkotaan akan bekerjasama dalam pembangunan transportasi pintar dan transportasi publik, untuk *E-Government* akan mengembangkan teknologi informasi yang terintegrasi dalam satu platform, dalam bidang budaya akan dibangun pusat kebudayaan masing-masing kota dan berperan dalam festival kebudayaan yang diselenggarakan. Saling tukar program untuk pembangunan kota juga dikembangkan dalam bidang pengembangan kapasitas.

Setelah berlangsungnya LoI, kerjasama ini berlanjut dengan datangnya para Tim Ahli dari Seoul untuk meneliti dan menyusun *Master Plan* pembangunan sistem transportasi cepat dan tertata di Bandung. Selain itu, kehadiran Tim Ahli diharapkan dapat membantu proses restorasi sungai dan penguatan pembangunan *Technopark*.

Pernyataan kehendak atau LoI selanjutnya dibahas bersama dengan DPRD Kota Bandung untuk mengkaji ulang rancangan bidang kerjasama yang tertuang dalam LoI agar lebih spesifik saat menjadi draft MoU. Setelah itu, kembali dirundingkan dalam rapat antar kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan dan beberapa Kementerian terkait. Setelah pembahasan tersebut

akhirnya diputuskannya draft MoU untuk kemudian ditindaklanjuti oleh tim teknis. Proses penandatanganan *Letter of Intent* (LoI) sampai ditandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) biasanya memakan waktu sekitar 1,5 sampai dengan 2 tahun. Begitupun kerjasama antar Pemerintah Kota Bandung dan Seoul memiliki jeda satu setengah tahun untuk berlanjut pada proses kesepakatan bersama.

Pada tanggal 7 Oktober 2016, penandatanganan MoU yang tertuang dalam “*Agreement Between City Government Of Bandung, The Republic Of Indonesia And Seoul Metropolitan Government, The Republic Of Korea Concerning Strengthening Friendship And Cooperation*” dilakukan oleh Walikota Bandung Mochamad Ridwan Kamil dan Walikota Seoul Park Won Soon di City Hall, Seoul dengan kesepakatan kerjasama melalui pertukaran persahabatan dan memperkuat jalinan kerja sama melalui berbagai keahlian dan praktik-praktik dalam bidang ekonomi perkotaan, perencanaan kota, transportasi perkotaan, dan *e-government*.

Kedua pihak juga dapat saling berbagi pengalaman dan dapat melakukan program pertukaran dalam bidang kebudayaan, seni, dan pariwisata, berbagi informasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, kedua pihak juga dapat secara aktif memfasilitasi pertukaran dan kolaborasi personel dan pelatihan jangka pendek ataupun panjang.

Kerjasama Kota Bandung dan Seoul bukan merupakan kerjasama *Sister City* biasa, namun kerjasama antar Pemerintah

Kota. Alasannya karena bukan *apple to apple*, dalam artian Seoul adalah ibukota negara Republik Korea Selatan namun Bandung hanya sebagai ibukota provinsi Jawa Barat, Indonesia. Selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2017, dua puluh orang pengusaha dari Korea datang ke Bandung dengan ASEAN-Korea sebagai promotor untuk manjajaki kerjasama. Kim Ki Hong, Sekjend ASEAN-Korea Center yang memimpin delegasi menawarkan kerjasama dalam bidang *Smart City* setelah banyak mempelajari karakteristik dari Kota Bandung yang memiliki kesamaan dengan Kota Metropolitan Seoul.

Syarat Pembentukan *Sister City*

Indonesia tentu sudah mengatur dalam pembentukan untuk menjalin kota kembar atau *sister city* bahkan *sister province* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008. Di pasal 5, pemerintah daerah harus memperhatikan :⁸

1. Kesetaraan status administrasi
2. Kesamaan karakteristik
3. Kesamaan permasalahan
4. Upaya saling melengkapi, dan
5. Peningkatan hubungan antar masyarakat.

Selain yang disebutkan diatas, pemerintah daerah juga diberikan persyaratan khusus yang dicantumkan di pasal 4, dengan isi⁹ :

1. Mempunyai hubungan diplomatik

2. Merupakan urusan daerah
3. Tidak membuka perwakilan kantor di luar negeri
4. Tidak mengarah pada urusan campur tangan dalam negeri
5. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan, dan
6. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dialihkan.

Dari syarat diatas, pemerintah daerah telah diberikan wewenang untuk mengatur urusan kerjasama dengan pihak luar negeri dengan catatan tidak untuk mencampuri urusan dalam negeri dan harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia. Dalam hubungan diplomatik, Indonesia mempunyai hubungan diplomatik dengan negara – negara asia, seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Selain dari Asia Indonesia juga menjalin hubungan diplomatik dengan Inggris, yang baru – baru ini Kota Bandung telah menandatangani hubungan *sister city* dengan Kota Seoul.

Perkembangan *Sister City* Kota Bandung

Indonesia telah melaksanakan kerjasama *sister city* semenjak tahun 1993, setidaknya terdapat 47 pemerintahan kota dari 33 provinsi Indonesia telah melakukan hubungan kemitraan *sister city* ini.¹⁰ Kota/Daerah tentunya terus berupaya memanfaatkan hubungan kerjasama ini memacu pertumbuhan dan pembangunannya masing-masing. Salah satu kota di Indonesia yang gencar berupaya meningkatkan pembangunannya melalui kerjasama *sister city* adalah Kota Bandung. Kerjasama yang dilakukan Kota Bandung ini pertama kali

⁸Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 Pasal 5

⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 Pasal 4.

¹⁰Andi Oetomo. Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema *Sister City* diakses pada 27 Mei 2022

dilaksanakan tahun 1960, dimana Kota Braunschweig, Jerman menjadi mitra kerjasamanya. Bentuk kerjasama ini sekaligus menjadi salah satu bentuk kerjasama tertua di Indonesia.¹¹

Salah satu tujuan Kota Bandung menjalin kerjasama sister city dengan banyak kota di dunia adalah untuk meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang. Seiring perkembangannya, Kota Bandung melanjutkan kerjasama *Sister City* dengan kota-kota lainnya. Adapun kota-kota yang telah menjalin kerjasama sister city dengan Kota Bandung sampai saat ini terhitung 14 kota dari negara-negara yang berbeda. Agar tercapainya tujuan peningkatan pembangunan dalam berbagai bidang tersebut, kerjasama ini harus diikuti dengan berbagai program kegiatan yang tetap serta terencana dengan baik. Adapun beberapa bidang yang menjadi bidang kerjasama *Sister City* diantaranya:

- (1) Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata;
- (2) Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi;
- (3) Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemuda dan Olahraga;
- (4) Bidang-bidang lain yang kemudian akan disetujui oleh kedua belah pihak.

Sejak terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Wali Kota Bandung, Misi kota Bandung terdiri dari 4 pokok yaitu:

- (1) Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang,

pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;

- (2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih, dan melayani;
- (3) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing, dan
- (4) Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan.¹²

Dalam upaya mewujudkan misi pertama, Kota Bandung menjalin kerjasama *Sister City* dengan salah satu kota di Korea Selatan yaitu Kota Seoul. Pemerintah Kota Bandung melihat Kota Metropolitan Seoul sebagai kota yang berhasil dalam proses penataan kota yang baik dan restorasi kawasan kumuh menjadi kawasan terbuka hijau.

Sehingga Seoul adalah mitra yang dapat membantu Kota Bandung mewujudkan misinya dalam pokok pertama. Kerjasama antara Bandung dan Seoul ini secara teori merupakan kerjasama *sister city*. Namun, menurut pemerintah Kota Bandung, sebenarnya kerjasama ini merupakan kerjasama kota sahabat. Hal tersebut dikarenakan tidak ada kesamaan karakteristik budaya, sosial, maupun geografi antara Kota Bandung dan Kota Seoul.

Pada Mei 2015, Kerjasama antara Bandung dan Seoul pertama kali diawali dan ditandatangani oleh kedua belah pihak melalui *Letter of Intent* (LoI). Setahun setelah penandatanganan LoI tersebut, KBRI

¹¹H. Apriliani. 2017. Hubungan Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Antara Bandung dan Seoul Tahun 2015-2017. Skripsi. Yogyakarta: Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses pada 27 Mei 2022

¹²Pemerintah Kota Bandung. Visi dan Misi Kota Bandung. Diakses pada 27 Mei 2022

Seoul menyatakan bahwa kesepakatan antara Pemerintah Kota Bandung dan Seoul ditindaklanjuti dengan melangsungkan kerjasama *Sister City* dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) oleh Ridwan Kamil dan Park Wonsoon pada 7 Oktober 2016 di City Hall, Seoul, serta disaksikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea John A. Prasetyo. Kedua Walikota menyepakati untuk melakukan kerjasama dan pertukaran informasi yang berfokus pada pengembangan Smart City dalam beberapa bidang, yaitu: Ekonomi Perkotaan, Perencanaan Tata Kota, Mode Transportasi Perkotaan, dan *E-government*.¹³

Penandatanganan ini juga ditindaklanjuti karena datangnya para pengusaha Korea yang dijemput oleh ASEAN-Korea Center. Rombongan tersebut disambut langsung oleh Wali Kota Bandung, M. Ridwan Kamil di Balai Kota Bandung. Baginya, ini merupakan salah satu jalan bagi Kota Bandung agar bisa mengoptimalkan pembangunan, khususnya infrastruktur. Pemerintah Kota Bandung dalam pertemuan tersebut mengaku telah memiliki solusi untuk menjadikan Bandung menjadi kota juara namun masih memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya. Delegasi para pengusaha Korea Selatan tersebut mengunjungi Kota Bandung dengan alasan yang berkaitan dengan program *smart city*. Para pengusaha tersebut merasa dapat membantu untuk mengembangkan program tersebut melalui pembangunan infrastruktur serta memenuhi kebutuhan Kota Bandung

¹³Kementrian Luar Negeri. Bandung dan Seoul Tandatangani MoU Kerjasama. Diakses pada 27 Mei 2022

lainnya. Selain melalui ASEAN-Korea Centre, Kota Bandung juga berupaya melibatkan pihak swasta melalui kunjungan langsung dan melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA).¹⁴ Dalam upaya mengembangkan tata kelola perkotaan secara maksimal, Kota Bandung tidak hanya melibatkan pihak pemerintah daerah dari Korea Selatan, tetapi juga berusaha melibatkan pihak-pihak privat Korea Selatan melalui kerjasama *sister city*. Hal ini dilakukan Kota Bandung dengan menerapkan skema pembiayaan *Public Private Partnership* (PPP) untuk mendanai proyek-proyek pembangunan Kota Bandung, khususnya dalam pembangunan tata kelola perkotaan.¹⁵

Implementasi Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dan Kota Seoul

1. Program Pemagangan Pegawai Seoul Metropolitan Government di Pemerintah Kota Bandung

Kerjasama antara Bandung dan Seoul masih terhitung sebagai kerjasama baru, namun kerjasama yang lebih berfokus pada tata kelola perkotaan dan *Smart City* ini telah banyak membantu pembangunan Kota Bandung dua tahun kebelakang.

Berikut ini adalah kerjasama yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul, antara lain :

1. Ekonomi perkotaan : Pembangunan

¹⁴Randyrey. 2017. Kerjasama Antara Pemerintah Kota Bandung dengan Kota Seoul, Korea Selatan, Berbuah Panjang. Diakses pada 27 Mei 2022

¹⁵Dian Rosadi. 2016. Pemkot Bandung akan bangun PPP Center untuk jaring investor luar negeri. Diakses pada 27 Mei 2022

- teknopolis;
2. Perencanaan perkotaan: Perbaikan kawasan kumuh, peremajaan kota, peremajaan kawasan yang menghadap kesungai;
 3. Transportasi perkotaan: Sistem transportasi pintar, sistem transportasi umum;
 4. *E-Government* : Sistem manajemen dan integrasi informasi, *digital platform*;
 5. Kebudayaan : Saling berpartisipasi dalam kegiatan dan festival budaya;
 6. Pembangunan kapasitas sumber daya manusia : Program pertukaran dan pelatihan pejabat kota

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kerangka City Bandung-Seoul, yaitu :

1. *Staff Exchange* antara Pemkot Bandung dan Seoul Metropolitan Government sebanyak dua kali, yang pertama dilaksanakan dari awal tahun 2019 sampai dengan bulan Juni 2020 di BAPPEDA berfokus pada sistem transportasi di Kota Bandung. Kedua mulai bulan September 2020 di bagian kerjasama berfokus pada sistem perpajakan, yang ditandai dengan adanya *Junior Expert* (Ho Young Lee) dari Seoul untuk meneliti sistem perpajakan dan mengambil informasi untuk menyusun *master plan* perbaikan sistem perpajakan di Bandung.
2. *Workshop* mengenai perpajakan dan restorasi sungai, di akhir November 2018.
3. Penandatanganan *Implementing of Arrangement* dalam bidang sistem

perpajakan yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Perpajakan Seoul dan Kepala BPPD Kota Bandung.

Kerjasama antar kota yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul yang telah berjalan beberapa tahun kebelakang, terhitung sejak penandatanganan kesepakatan bersama masih belum menemukan hambatan yang cukup berarti. Dari keterangan Staff Bagian Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Bandung, kerjasama yang berjalan antar kedua belah pihak terbilang cukup bagus karena sejalan dengan misi kota Bandung yang pertama yaitu mewujudkan Bandung yang nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.

2. Fasilitasi Pembukaan *Little Bandung Wall* di Kota Seoul

Program *Little Bandung*, khususnya *Little Bandung Wall* yang ada di Seoul, memang merupakan inisiasi dari Pemerintah Kota Bandung, adapun alasan mengapa Pemerintah Kota Bandung memilih Seoul untuk membuka program tersebut adalah salah satunya karena gagasan dari Ibu Atalia Kamil, istri dari Wali Kota Bandung saat itu yaitu Ridwan Kamil. Ibu Atalia sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) memberikan usul agar Program *Little Bandung Wall* dapat dibuka di Seoul, Korea Selatan. Pemerintah Kota Bandung kemudian mencari mitra untuk tempat

Program *Little Bandung* tersebut. Proses ini dilakukan saat Wali Kota Bandung melakukan proses penandatanganan MoU di City Hall, Seoul pada bulan Oktober 2018 lalu. Kemudian melalui koneksi yang dimiliki oleh Ibu Atalia, juga dibantu oleh pihak KBRI Seoul, akhirnya *Little Bandung Wall* di buka di dua resto di Seoul, yaitu di Bali Bistro dan Fun Road Cafe.

Kepentingan yang diharapkan dapat terpenuhi dari adanya kerjasama ini ialah salah satunya diharapkan dalam bidang perdagangan Kota Bandung dapat melakukan ekspor ke Seoul, produk-produk UKM Kota Bandung dapat dipasarkan di Seoul. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Metropolitan Seoul pada awalnya diinisiasi oleh Pemerintah Metropolitan Seoul. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Bandung dinilai dapat menjadi mitra yang menjanjikan bagi Pemerintah Metropolitan Seoul. Kerjasama yang terjalin antara kedua belah pihak diantaranya ialah untuk saling mempromosikan keunikan dan membuka pasar potensial bagi produk-produk yang dimiliki oleh kedua kota.

Pemerintah telah melaksanakan program *Little Bandung* yang diadakan di Seoul, Korea Selatan. Adapun program *Little Bandung* yang telah dilaksanakan setelah adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Metropolitan Seoul ialah Halal Expo Korea 2018 dan Seoul International Gift Show 2018. Acara berikutnya ialah Seoul Gift Show dilaksanakan pada tanggal 8 sampai dengan 11 September 2018 di COEX Hall A.

Acara tersebut merupakan pameran produk hadiah terbesar di Korea sejak tahun 1983. Sejumlah besar produsen dan produknya telah mencatat kesuksesan memimpin tren lebih dari 32 tahun. SIGS menawarkan berbagai macam produk premium dan hadiah dengan desain yang inovatif serta produk anak-anak dan bayi dan juga kerajinan.

Dengan pembeli dari 7 negara, SIGS menjadi *platform* sempurna untuk mempromosikan, mengembangkan produk dan membangun prospek penjualan di Korea. Dalam acara ini Kota Bandung diwakili oleh perusahaan: Hesqiva, Motiviga, Arisya & *Friends*. Setelah adanya penandatanganan MoU antara Pemerintah Kota Bandung dengan Pemerintah Metropolitan Seoul, terdapat satu *event* program *Little Bandung Mobile* yang dilaksanakan di Seoul, yaitu acara *Handmade Korea Summer* ke-8. Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 sampai dengan 23 Juli 2019.

Korea Handmade merupakan satu-satunya festival budaya baik bagi seniman dan masyarakat yang diadakan di COEX, Seoul sejak tahun 2011. Mulai dari tahun 2016 kemarin, *Handmade Korea* berlangsung dua kali dalam setahun yaitu pada musim panas dan musim dingin. Acara ini merupakan *platform offline* yang menghubungkan masyarakat dan seniman, pekerja seni serta artis. Pemerintah Kota Bandung berharap dengan dibukanya *Little Bandung Wall* dapat memanfaatkan kerjasama yang telah terjadi di antara kedua kota untuk menaikkan tingkat ekspor Indonesia ke Seoul, Korea Selatan.

3. Revitalisasi Sungai Cikapundung

Pemerintah Kota Bandung melihat Kota Metropolitan Seoul sebagai kota yang berhasil dalam proses penataan kota yang baik dan restorasi kawasan kumuh menjadi kawasan terbuka hijau. Dalam aspek ini, Pemerintah Kota Seoul berhasil merestorasi sungai Chong Gye Cheon. Sungai Chong Gye Cheon merupakan sungai bersejarah sejak Dinasti Joseon. Sekitar 600 tahun yang lalu, sungai ini merupakan tempat pusat transportasi air. Namun pada tahun 1960-an, sungai Chong Gye Cheon beralih fungsi sejak jembatan layang didirikan di atasnya. Sehingga, sejak saat itu, kondisi bantaran sungai menjadi tempat kumuh.

Baru pada tahun 2003, Walikota Seoul pada waktu itu Lee Myung Bak meluncurkan program “Revolusi 5,8 km” untuk mengubah Chong Gye Cheon menjadi kawasan hijau dan bersih. Pada tahun 2005, proyek besar tersebut terealisasi. Kawasan Sungai Chong Gye Cheon berubah menjadi kawasan terbuka hijau dilengkapi oleh pedestrian tempat rekreasi masyarakat.

Dampak luar biasa dari terwujudnya restorasi ini dapat menurunkan suhu kota Seoul sampai dengan 3,6 derajat celsius pada musim panas. Ikan, burung-burung dan pepohonan dapat tumbuh berkembang dengan baik tanpa tercemar limbah. Kawasan Sungai Chong Gye Cheon semakin terlihat ciamik saat malam hari karena dihiasi oleh lampu-lampu nan cantik. Sebuah konsep restorasi sungai yang berhasil mengubah citra Seoul dari kota “abu-abu” menjadi kota hijau, sehat dan berorientasi lingkungan.

Pemerintah Kota Metropolitan Seoul membantu Pemerintah Kota Bandung dalam proses restorasi sungai Cikapundung sepanjang satu kilometer di daerah Pasirluyu, Kecamatan Gregol. Sungai Cikapundung merupakan salah satu anak sungai yang bermuara di Sungai Citarum, terkenal dengan kawasan kumuh dan tidak terawat. Bantaran Sungai Cikapundung dijadikan pemukiman warga dan tak jarang kawasan ini sering tertimpa bencana banjir akibat sampah yang menyumbat aliran air sungai.

Oleh karena permasalahan tersebut, upaya revitalisasi Sungai Cikapundung dirancang oleh Pemerintah Kota Bandung yang akan didampingi oleh Pemerintah Kota Seoul. Penanggung jawab kerjasama restorasi Sungai Cikapundung adalah Profesor Geoteknik Teknik Sipil dari Universitas Konkuk, Jong Ho Shin akan memperbaiki sistem sanitasi di daerah tersebut sebelum merevitalisasi secara keseluruhan.

Pada Januari 2016, kawasan restorasi Sungai Cikapundung selesai dan diresmikan. Kini wajah Sungai Cikapundung berubah, tidak terlihat ada pemukiman kumuh dan gunung sampah lagi. Warga yang bertempat tinggal dibantaran sungai telah direlokasi ke rusun. Sungai Cikapundung bertransformasi menjadi kawasan hijau dan menarik untuk dikunjungi. Banyaknya tanaman hias, area pedestrian, *amphitheater outdoor* menghias kawasan ini, terutama air mancur warna-warni di malam hari yang membuat teras Cikapundung semakin cantik.

Selain Sungai Cikapundung, restorasi sungai yang terinspirasi dari Sungai Chong Gye Cheon juga dilakukan pada Sungai Cikapayang. Sungai ini berada ditengah pusat kota Bandung. Letaknya disepanjang jalan Merdeka, mengalir tepat disamping komplek Balai Kota. Sungai Cikapayang ini dulunya kotor dan bau, sehingga membuat estetika Kota Bandung terganggu.

Namun, setelah direstorasi Sungai Cikapayang dapat menjadi salah satu daya tarik masyarakat dan proyek percontohan pemerintah. Restorasi Sungai Cikapayang dilengkapi teknologi “*water treatment*” untuk menjernihkan air. Desain restorasi Sungai juga dilengkapi taman, dan tangga berundak. Sehingga dapat dijadikan ruang publik yang nyaman ditengah Kota, seperti halnya Sungai Chong Gye Cheon di Seoul, Korea Selatan.

KESIMPULAN

Suatu negara tentu tidak dapat memenuhi kebutuhan nasionalnya sendiri. Sehingga suatu negara melakukan politik luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dari dalam negeri melalui pemenuhan kebutuhan dari luar. Politik luar negeri biasanya identik dengan diplomasi dan negosiasi yang dilakukan dengan hasil akhir berupa sebuah kerjasama. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mencoba untuk menjalin banyak kerjasama, baik itu kerjasama multilateral maupun bilateral.

Salah satu mitra kerjasama bilateral Indonesia ialah Korea Selatan. Indonesia telah membangun hubungan diplomatik

dengan Korea Selatan sejak tahun 1973, kedua negara terkait dengan koneksi yang saling menguntungkan.

Dari kerjasama ini, Pemerintah Kota Bandung dapat mencontoh dan menerapkan program yang dilakukan oleh Kota Metropolitan Seoul. Untuk hubungan kerjasama yang lebih baik, yang perlu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu adanya koordinasi internal masing-masing Pemerintah Kota dan meningkatkan saling pengertian antar keduanya. Kerjasama Sister City yang dilaksanakan antara pemerintah kota Bandung dan Seoul menyatakan bahwa kerjasama antar kota berarti ada dan terjalinnya hubungan komunikasi secara dua arah dengan program yang tersusun dan teragendakan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Andi Oetomo, “Pengelolaan Perkotaan Lewat Skema Sister City,” vol. 1, 2010, diakses melalui http://tataruang.atr-bpn.go.id/Bulletin/upload/data_artike/1/edisi3i.pdf diakses pada 27 Mei 2022

Laode Muh. Fathun, “Human Rights in International Relations”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1 No. 1 Januari - Juni 2017, h. 168-169

H. Apriliani. 2017. Hubungan Kerjasama Kota Kembar (Sister City) Antara Bandung dan Seoul Tahun 2015-2017. Skripsi. Yogyakarta:

Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Diakses pada 27 Mei 2022

<http://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl> pada tanggal 28 September 2021

Pemerintah Ivo Duchacek. 1990. Dikutip oleh Stivani Sinambela. “*Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional ‘Studi Kasus: Kerjasama Sister City Kota Medan dan Kota Penang’*” (Thesis UMY. Yogyakarta. 2014) hal. 18.

Bandung dan Seoul Tandatangani Kerjasama. Kedutaan Republik Indonesia di Seoul, diakses melalui <https://kemlu.go.id/seoul/id> pada 28 September 2021

Bandung Merdeka News. 2016. *Pemkot Bandung akan Bangun PPP Center untuk Jaring Investor Luar Negeri*. diakses melalui <https://bandung.merdeka.com/halo-bandung/pemkot-bandung-akan-bangun-ppp-center-untuk-jaring-investor-luar-negeri-160615j.html> pada 27 Mei 2022

Buku

Criekemans, David, (2008) “*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*”, hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menko Airlangga Dampingi Presiden RI ke Korsel, Sejumlah Kerja Sama Ekonomi Disepakati, diakses melalui <https://ekon.go.id/publikasi/detail/5/menko-airlangga-dampingi-presiden-ri-ke-korsel-sejumlah-kerja-sama-ekonomi-disepakati> pada 26 Oktober 2021.

Muh. Fathun Laode, (2017), review buku “*Human Rights in International Relations*”, Hal. 169

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 3 Tahun 2008 Pasal 4 dan 5

Portal Bandung. Visi dan Misi Kota Bandung. Diakses melalui <https://www.bandung.go.id/sub-etalase/3/visi-misi> pada 27 Mei 2022

Internet

Bagian Kerjasama Kota Bandung, *Kerjasama Daerah dengan Pemerintah Daerah Luar Negeri (KSDPL)* diakses melalui